



DIREKTORAT INFORMASI DAN MEDIA

PRESS CABLE

NOMOR : 236/19122008
HARI : JUMAT
TANGGAL : 19 DESEMBER 2008

DAFTAR ISI

		Halaman
I.	INTERNASIONAL	
	Dua WNI Ditembak Mati Polisi Malaysia	3
	Presiden: Banyak yang Salah Persepsi Atas Indonesia	3
	Parlemen Asia Minta Myanmar Bebaskan Tahanan Politik	4
II.	NASIONAL	
	A. POLITIK	
	Kontroversi UU BHP: Mahalnya Biaya Bisa Menurunkan Kualitas Pendidikan	4
	B. EKONOMI	
	Penanganan Krisis Disimulasikan	5
	Usut Tuntas Kasus Ekspor Udang Tujuh Kontainer Akan Dijual ke Pasar Lain	6
	RI Butuh Pembangunan Pertanian Berkelanjutan	8
	Perekonomian Indonesia Baru Akan Pulih 2011	8
	C. SOSBUD	
	Indonesians, Australians exchange visa program	10
	D. HANKAM	--
	E. HUKUM	

		Pekerja Migran: Tinjau Ulang Perjanjian Bilateral	11
	F.	OLAHRAGA	--
	G.	LINGKUNGAN HIDUP	
III.	ARTIKEL		
		Viewpoint: Ali Alatas: 1932 to 2008 (By Ed Masters)	12
		Perlucutan Nuklir Korut Masih Temui Kendala (Oleh Askan Krisna)	14
		Kesetiakawanan di Tengah Krisis Global (oleh Bambang W Soeharto)	15
IV.	LAIN-LAIN		--
V.	EDITORIAL		
		Perdamaian Butuh Keadilan	16

Jakarta, 19 Desember 2008
Sub Direktorat Berita
Direktorat Informasi dan Media

I. INTERNASIONAL :

1. Dua WNI Ditembak Mati Polisi Malaysia

Polisi Malaysia menembak mati dua lelaki warga negara setempat dan dua warga negara Indonesia (WNI) yang diduga akan merampok di kawasan perumahan Taman Guar Perahu, Bukit Mertajam, Pulau Pinang, Kamis (18/12).

Penembakan dilakukan sekitar pukul 05.00 waktu setempat atau 04.00 WIB. Menurut Wakil Kepala Polisi Pulau Pinang Salleh Mat Rasid di Malaysia, Jumat (19/12), ada informasi kepada polisi mengenai sekumpulan laki-laki dalam mobil yang mencurigakan di kawasan perumahan Taman Guar Perahu.

Isi berita diluar tanggungjawab Direktorat Infomed, Deplu

Namun belum dijelaskan mengenai nama serta identitas kedua orang yang diduga dari Indonesia itu.

Satu tim polisi terdiri atas tujuh orang dikirim untuk melihat lokasi kemudian melihat mobil yang mencurigakan itu dan diikuti. Sadar diikuti polisi, kata Saleh, mereka menancap gas sambil melepaskan tembakan ke arah mobil polisi.

Polisi Malaysia terpaksa membalas tembakan dan berhasil membunuh empat laki-laki yang mencurigakan itu. Dari empat korban tembak itu, dua laki-laki memiliki paspor hijau atau paspor Indonesia.

Setelah melumpuhkan empat laki-laki yang dicurigai melakukan kriminal, polisi menemukan plat nomor mobil itu ternyata palsu, ditemukan sepucuk pistol, parang dan berbagai peralatan yang diduga sering digunakan untuk melakukan perampokan rumah.

Gerombolan laki-laki ini diduga terlibat dalam beberapa kasus pencurian dan perampokan rumah di Pulau Pinang. Dua warga Malaysia berusia sekitar 40 tahun, dan dua warga Indonesia berusia 30 tahunan. Namun identitas mereka masih di dipelajari . (Media Indonesia)

2. Presiden: Banyak yang Salah Persepsi Atas Indonesia

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengakui banyak pihak yang kerap salah persepsi dalam memahami Indonesia sehingga menimbulkan prasangka buruk.

"Saya teringat saat bertemu dengan Collin Powel dari AS, saat saya masih menjadi menteri. Saat itu ia bilang Indonesia adalah negara yang sering salah untuk dipahami," kata Presiden saat memberikan sambutan dalam peluncuran buku *Indonesia Unggul* di Grand Indonesia Jakarta, Jumat (19/12) sore.

Selain sebagai sebuah negara yang sering salah dipahami oleh pihak lain, katanya, agama yang dipeluk oleh mayoritas bangsa Indonesia, agama Islam, juga mengalami hal yang sama.

"Saya juga banyak menyampaikan tentang Islam. Islam juga agama yang sering kali salah dipahami," kata Presiden yang didampingi Ibu Ani Yudhoyono.

Oleh karena itu, sebagai Kepala Negara, Yudhoyono mengatakan, adalah kewajibannya untuk meluruskan kesalahpahaman itu dengan berbagai cara termasuk dengan menulis sebuah buku.

Indonesia Unggul yang merupakan versi bahasa Indonesia dari buku karangan Presiden Yudhoyono berjudul *Indonesia on the Move*, memuat sejumlah pidato dan pemikiran Yudhoyono tentang berbagai hal dan aspek.

"Dalam buku ini saya banyak berbicara tentang demokrasi dan berbagai hal lainnya," kata Kepala Negara.

Ia menambahkan, sebagai bangsa, Indonesia mempunyai potensi yang luar biasa salah satunya adalah kebersamaan dan kemandirian.

Sejak awal berdirinya, Indonesia ditempa dalam berbagai kesulitan dan diramalkan oleh banyak pihak tidak akan bertahan lama. Namun, menurut Kepala Negara, hal itu justru membuat bangsa menjadi kuat dan bersatu.

Oleh sebab itu, Presiden Yudhoyono mengajak semua pihak untuk terus mengembangkan budaya positif untuk mendorong berkembangnya peradaban yang mulia di Indonesia.(Media Indonesia)

3. Parlemen Asia Minta Myanmar Bebaskan Tahanan Politik

Sedikitnya 241 anggota parlemen negara Asia, termasuk 13 di antaranya dari Indonesia, mengajukan surat petisi kepada Sekjen PBB Ban Ki-moon dan meminta pemerintah Myanmar membebaskan semua tahanan politik sebelum 31 Desember ini.

Surat tersebut disampaikan setelah 112 mantan presiden dan perdana menteri dari 50 negara mengirim surat kepada Sekjen PBB yang juga memohon agar ia mengunjungi Myanmar untuk menjamin dibebaskannya lebih 2.100 tahanan politik di negara itu.

Ketigabelas anggota parlemen Indonesia (DPR) yang ikut serta dalam petisi itu adalah Agung Laksono, Djoko Susilo, Nursyahbani Katjasungkana, Evan Sundari, Marzuki Darusman, Yuddy Chrisnandi, Anna Muawanah, Jeffrie Massie, Happay Bone, Jacobus Mayang Padang, Slamet Effendi Yusuf, M. Djunaedi dan Zulkifli Halim, demikian siaran pers kantor Kaukus Myanmar Antar-Parlemen ASEAN (AIPMC) di Jakarta, Selasa lalu.

Selain dari Indonesia, para anggota parlemen itu berasal dari Thailand, Jepang, Korea Selatan, Kamboja, Malaysia, Filipina dan Singapura.

Mereka menyatakan sangat prihatin dengan lambatnya perkembangan hak azasi manusia di Myanmar.

Penting bagi Sekjen PBB Ban Ki-moon untuk mengunjungi Myanmar secara khusus dan terlibat dalam dialog yang serius dengan rezim militer dan menyampaikan kepada mereka permintaan dari para pemimpin dan anggota parlemen di Asia dan dunia guna membebaskan seluruh tahanan politik, kata presiden AIPMC, Kraisak Choonhavan .

Menurut dia, penderitaan rakyat Myanmar tidak boleh berlanjut dan dunia tak boleh duduk diam dan hanya membantu ketika bencana alam menimpa, kata Kraisak dalam surat yang terpisah untuk sekjen PBB.

Para anggota parlemen dari delapan negara tersebut mengingatkan sekjen PBB bahwa Dewan Keamanan PBB, Sidang Umum PBB dan Dewan Hak Azasi Manusia PBB telah memohon pada rezim militer di Myanmar agar segera membebaskan seluruh tahanan politik. Namun permintaan itu ditolak oleh junta militer negara itu.

(ANTARA)

| | | .

NASIONAL :

A. POLITIK :

1. Kontroversi UU BHP: Mahalnya Biaya Bisa Menurunkan Kualitas Pendidikan

Pro-kontra soal pengesahan Undang-undang Badan Hukum Pendidikan masih terus berlangsung hingga Kamis (18/12). Persoalan pendanaan pendidikan tetap menjadi kekhawatiran utama karena akan muncul persaingan di antara perguruan tinggi sehingga dana pemerintah akan semakin sulit didapat.

Sementara itu, perguruan tinggi swasta mempertanyakan keberpihakan pemerintah kepada lembaga pendidikan swasta. Sementara, pemberlakuan Undang Undang Badan Hukum Pendidikan (UUBHP) yang mengatur hingga ke tata organisasi dinilai berpotensi mengkooptasi kegiatan akademis di kampus.

Demikian antara lain pendapat yang terjaring pada Kamis (18/12) dari berbagai lembaga pendidikan tinggi negeri dan swasta dari berbagai daerah.

Muchlis Luddin, pengamat pendidikan dari Universitas Negeri Jakarta dalam diskusi panel "Otonomi Kampus dan Peluang Perbaikan Bangsa" yang diadakan Lembaga Pengkajian dan Pengabdian Masyarakat Demokratis (LPPMD) Universitas Padjadjaran di Bandung menegaskan, UU BHP pada implementasinya memicu persaingan tinggi di antara lembaga pendidikan. Akibatnya, dana hibah dari pemerintah akan kian sulit didapat. "Kampus tidak lagi jadi benteng peradaban. Padahal, lewat lembaga pendidikan lah peradaban dan nasib bangsa ini ke depan dipertaruhkan," ungkap Muchlis. Jadi, tidak mungkin campur tangan pemerintah dapat dihilangkan sepenuhnya. Wakil Ketua Majelis Wali Amanah ITB Rizal Tamin mengungkapkan kekhawatiran serupa. Sementara Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan khawatir mutu pendidikan merosot seiring meningkatnya biaya pendidikan.

Undang-undang tersebut juga berpengaruh pada kualitas hubungan murid-guru seperti dicituskan Ketua III Majelis Luhur Taman Siswa Bidang Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Wuryadi di Yogyakarta yang juga Ketua Dewan Pendidikan DIY. Hubungan itu, katanya, nantinya tereduksi menjadi hubungan konsumen dan penyedia jasa belaka. Sekarang Taman Siswa menyiapkan materi judicial review untuk diajukan ke Mahkamah Konstitusi.

Suharyadi, Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia menilai dalam UU BHP ini, untuk PTS atau lembaga pendidikan swasta, pemerintah belum memberi bantuan dana yang proporsional padahal tidak semua lembaga pendidikan formal swasta itu kuat secara finansial.

Heri Akhmadi, Ketua Panitia Kerja RUU BHP Komisi X DPR, mengatakan, penolakan terhadap BHP itu dinilai akibat belum dipahaminya semangat dan substansi pasal demi pasal UU BHP.

Heri menjelaskan, jika mengacu pada UU BHP seharusnya biaya semakin murah, karena ada batasan pungutan kepada masyarakat yaitu paling banyak sekitar 33 persen biaya operasional.

Persetujuan juga datang dari Rektor Universitas Indonesia Prof Dr Gumilar Rusliwa Somantri. "Dengan ini sebuah perguruan tinggi justru akan menjadi mandiri mencari sumber dana dan tak hanya mengandalkan subsidi pemerintah," jelasnya.

Isi berita diluar tanggungjawab Direktorat Infomed, Deplu

Menurutnya, sejalan dengan munculnya tren kewiraswastaan di dunia perguruan tinggi, sejauh hasilnya untuk peningkatan kualitas pendidikan dan penelitian, hal itu tak dapat disebut sebagai komersialisasi pendidikan tinggi. (Kompas)

B. EKONOMI

:

1. Penanganan Krisis Disimulasikan

Protokol simulasi mengacu pada Perpu tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan yang ditolak DPR.

Pemerintah melakukan simulasi penanganan krisis mengacu kepada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK). Kepala Badan Kebijakan Fiskal Departemen Keuangan Anggito Abimanyu mengatakan, seluruh faktor pemicu krisis berikut langkah-langkah pengamanannya akan dibahas. Pelaksanaan simulasi juga melibatkan Dewan Gubernur Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan.

Dia mencontohkan penanganan krisis di sektor keuangan bila ada bank ataupun lembaga keuangan nonbank gagal yang berdampak sistemik. Eksekusi fasilitas pembiayaan jangka pendek dari BI juga termasuk salah satu topik yang dibahas.

“BI mengajukannya bagaimana saat ada risiko sistemik. Penilaiannya seperti apa. Kajian dari KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan) bagaimana. Bagaimana kalau ditolak. Jadi, kita tidak terbata-bata,” kata dia di Jakarta, Jumat (19/12).

Dia menjelaskan, simulasi itu adalah yang pertama sejak krisis di sektor keuangan global terjadi. Protokol yang digunakan dalam simulasi itu adalah Perpu JPSK yang beberapa waktu sebelumnya ditolak DPR.

Namun, simulasi belum mencakup pola pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bila tidak ada lembaga donor yang bersedia memberi pinjaman atau pemerintah tidak dapat menghimpun dana melalui penerbitan surat utang negara.

“Pemerintah juga akan mempertimbangkan masukan dari DPR. Itu sedang kami analisis dan diskusikan,” kata dia.

Ekonom Senior Bank Negara Indonesia Tbk Ryan Kiryanto menilai Perpu JPSK memiliki kekuatan cukup baik untuk mengamankan bank-bank yang bermasalah, terutama yang berdampak sistemik seperti Bank Century Tbk.

Pemerintah juga berencana memasukkan pengaturan fasilitas pendanaan darurat lebih rinci dalam RUU JPSK yang akan segera diserahkan ke DPR.

Keduanya adalah topik yang penting dalam penanganan krisis meskipun sebenarnya substansi fasilitas pendanaan darurat telah ada dalam APBN 2009.

“Perpu No 4 Tahun 2008 tentang JPSK sebenarnya sudah memadai, karena kalau memang ada fasilitas pendanaan darurat, ada mekanismenya. Kalau mau ditambahkan, juga tidak masalah,” ujar dia.

Ketua Umum Ikatan Bankir Indonesia (IBI) Agus Martowardojo mengatakan, kalangan perbankan tetap merekomendasikan Perpu JPSK segera disetujui menjadi undang-undang. Sebab, penanganan krisis berikut upaya-upaya menciptakan stabilitas di sektor keuangan memerlukan payung hukum yang kuat.

Menurut dia, Perpu JPSK telah terbukti ampuh mencegah kolapsnya industri perbankan dengan diselamatkannya Bank Century. Pengambilalihan bank hasil merger Bank Danpac, Pikko, dan CIC International itu telah berhasil menjaga stabilitas sistem perbankan.

“Seandainya (Bank) Century tidak diselamatkan, belum tentu industri perbankan (masih bisa stabil) seperti sekarang,” kata dia.

Ekonom Senior *The Indonesia Economic Intelligence* (IEI) Djoko Retnadi mengatakan, kejatuhan bank yang berdampak sistemik akan menghancurkan sendi-sendi perekonomian. Bila tidak diselamatkan, gagalnya bank yang berdampak sistemik akan meruntuhkan sistem perbankan sebagai jantung perekonomian.

“Dampaknya sangat mengerikan. Bank-bank bangkrut sehingga tidak bisa membiayai dunia usaha. Ekonomi akan kembali ke zaman primitif,” kata dia.

Dia mengusulkan pemerintah, BI, dan LPS yang tergabung dalam KSSK melibatkan peran anggota dewan dalam mengambil keputusan. Dengan syarat, DPR berkomitmen mengambil keputusan penanganan krisis secara cepat. Misalnya, keputusan diambil paling lambat 1 kali 24 jam. (Jurnal Nasional)

2. Usut Tuntas Kasus Ekspor Udang Tujuh Kontainer Akan Dijual ke Pasar Lain

Departemen Kelautan dan Perikanan menunggu klarifikasi dari Dinas Kepabeanan dan Bea Cukai Amerika Serikat terkait dugaan praktik pemindahan barang impor antarkapal berupa udang dari China melalui Indonesia. Klarifikasi itu untuk mencegah rusaknya kepercayaan pasar ekspor.

Demikian dikemukakan Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) Departemen Kelautan dan Perikanan Martani Huseini saat dihubungi dari Jakarta, Kamis (18/12).

Isi berita diluar tanggungjawab Direktorat Infomed, Deplu

P2HP DKP telah mengirim surat ke Departemen Perdagangan agar mendesak Dinas Kepabeanan dan Bea Cukai AS memberikan klarifikasi tentang dugaan pemindahan barang impor antarkapal (transshipment) itu.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Coldstorage Indonesia (APCI) Johan Suryadarma menyatakan, "Kesimpangsiuran masalah ekspor udang harus segera diungkapkan dan diselesaikan oleh pemerintah dan pelaku usaha. Jika dibiarkan, dapat mengganggu kepercayaan pasar ekspor terhadap produk Indonesia."

Sebelumnya, pengelola Terminal Peti Kemas PT Pelabuhan Indonesia II Cabang Panjang Bandar Lampung menyampaikan adanya pengembalian enam kontainer berisi udang beku milik PT Centralproteina Prima (CP Prima) pada minggu lalu dan satu kontainer pada 16 Desember.

Dari penelusuran awal didapat informasi, pengembalian kontainer tersebut karena ada dugaan transshipment, alasan kepabeanan AS, serta mutu produk tidak sesuai permintaan pembeli.

Martani mengemukakan, apabila praktik transshipment terbukti, CP Prima dikenai sanksi berupa kewajiban membayar pajak bea masuk 112 persen. "Jika tidak terbukti, kita harus berjuang memulihkan nama baik produk Indonesia," katanya.

Dugaan transshipment dibantah oleh Corporate Communication Manager PT CP Prima Tbk Fajar Reksoprodjo, Rabu (17/12). Dikatakan, seluruh produk udang yang diekspor disertai surat keterangan asal (SKA). Tujuh kontainer itu bukan dikembalikan, tetapi dialihkan sementara.

Menurut Kepala Bea dan Cukai Kantor Pelabuhan Panjang, Bandar Lampung, Alamsyah, sampai kemarin, Kantor Bea dan Cukai sudah mendapatkan manifes pengembalian tujuh kontainer itu, tanpa ada keterangan alasan pengembalian.

Terhadap kontainer yang dikembalikan, Kantor Bea dan Cukai Kantor Pelayanan Pelabuhan Panjang membebaskan bea masuk. Alasannya, barang itu barang reimport. Hingga kini, PT CP Prima belum mengurus dokumen permintaan impor barang (PIB).

"Apabila dalam 30 hari sejak kedatangan perusahaan belum mengurus, Bea dan Cukai menganggap barang dalam kontainer itu sebagai barang yang dicegah," kata Alamsyah.

Vice Executive Marketing PT CP Prima Budhi Santosa dalam pertemuan dengan para petambak intensif anggota Shrimb Club Indonesia (SCI) di Bandar Lampung menyatakan, pihaknya berencana mengemas ulang tujuh kontainer berisi produk udang yang dikembalikan pembeli dari AS dan selanjutnya menjualnya ke pasar lain yang berminat.

Pengembalian itu, kata Budhi, karena pembeli di Los Angeles, AS, tidak bisa membayar udang yang dikirimkan sehingga produk harus dikembalikan ke Indonesia.

Usut pasar

Direktur Perdagangan Dalam Negeri DKP Sadullah Muhti mengemukakan, pihaknya sedang menerjunkan tim ke Bandar Lampung guna menelusuri dugaan merembesnya produk ekspor ke pasar dalam negeri.

"Kami sedang menelusuri kebenaran informasi pasar. Perlu dikaji, apakah anjloknya harga udang karena rembesan produk ekspor atau panen yang berlebih," kata Sadullah.

Berdasarkan ketentuan, produk pangan dari industri kawasan berikat dapat dilepas ke pasar domestik maksimum 25 persen dari total produksinya.

Pasar udang dalam negeri meningkat. Tahun 2007, penjualan di pasar domestik 165.000 ton, tahun 2006 yang hanya 150.000 ton. Hingga akhir 2008, penjualan produk udang diprediksi 190.000 ton. (Kompas)

3. RI Butuh Pembangunan Pertanian Berkelanjutan

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan pembangunan berkelanjutan di bidang pertanian sangat penting bagi Indonesia agar secara bertahap negeri ini mampu mewujudkan swasembada pangan.

"Saya yakin dengan rencana yang baik, program yang baik dan dilaksanakan dengan baik, maka hasilnya pun akan baik karena semua pihak sudah memahami masalah yang kita hadapi dan perannya masing-masing," kata Presiden saat menyerahkan penghargaan Peningkatan Produksi Beras Nasional dan Ketahanan Pangan 2008 kepada Kepala Daerah dan Kelompok Tani di Istana Negara Jakarta, Kamis (18/12).

Kepala Negara menyatakan keyakinannya bahwa dalam lima tahun ke depan Indonesia mampu mencapai swasembada kedelai, gula, dan daging sapi sehingga tidak bergantung pada impor komoditas tersebut.

Karena itu, sangat penting pembangunan berkelanjutan khususnya di bidang pertanian dijalankan. "Menjadi kewajiban para pemimpin baik di pusat maupun daerah untuk terus melanjutkan program ketahanan pangan yang telah ada," kata SBY.

Presiden mencontohkan keberhasilan yang dicapai China yang beberapa hari terakhir ini memeringati 30 tahun reformasi mereka. SBY menyatakan terkesan atas transisi pimpinan pemerintahan di China yang berlangsung dengan baik dan terjadi kesinambungan program pembangunan sehingga pada 2008 ini berhasil mencapai sejumlah capaian yang luar biasa termasuk penyelenggaraan Olimpiade Beijing.

"Setiap keberhasilan yang kita capai itu adalah hasil usaha bersama kita, sementara bila ada kekurangan mari kita perbaiki dan tidak saling menyalahkan. Ini penting agar pembangunan dapat berjalan dengan baik," kata dia.

Presiden menyerahkan penghargaan kepada 16 gubernur dan 116 bupati/wali kota atas upaya mereka meningkatkan produksi beras nasional di daerahnya masing-masing sebesar 5% dari produksi tahun-tahun sebelumnya.

Dua tahun lalu, kepada Menteri Pertanian saya berjanji untuk memberikan penghargaan langsung kepada pejabat di mana saja yang berprestasi dalam meningkatkan produksi beras dan ketahanan pangan. Ini merupakan budaya yang baik untuk memotivasi dan memicu semangat bekerja untuk mencapai hasil yang baik di daerah yang dipimpinnya," kata SBY.

Delapan peneliti juga mendapatkan penghargaan berkaitan dengan produksi beras dan ketahanan pangan. Di antaranya Aan Andang Darajat dari Balai Besar Penelitian Padi Sukamandi, Jawa Barat, dan Sania Saenong dari Balai Penelitian Tanaman Serelia, Maros, Sulawesi Selatan.

Empat teknisi Litkayasa, empat inseminator, empat dokter hewan, empat paramedis, tiga mantri tani, tiga petugas pengawas benih tanaman, empat petugas pelayanan informasi pasar, tiga petugas karantina mendapat penghargaan serupa.

Penghargaan juga diberikan kepada 19 kelompok agribisnis tanaman pangan, 24 kelompok agribisnis hortikultura, 20 kelompok agribisnis ternak, lima kelompok tani pengelola tata air mikro, sembilan kelompok pengembang perkebunan, enam kelompok agribisnis perkebunan, empat kelompok pelaku usaha pascapanen, dan empat kelompok pengolahan hasil pertanian dari seluruh Indonesia.

Empat pengusaha penerap jaminan mutu dan eskportir serta 18 kelompok masyarakat lainnya yang berjasa dalam ketahanan pangan juga mendapatkan penghargaan. (Jurnal Nasional)

3.Perekonomian Indonesia Baru Akan Pulih 2011

Dampak berantai (*multiplier effect*) dari krisis finansial global yang memicu PHK akan makin terasa di masyarakat lapisan bawah. Pernyataan tersebut dikemukakan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dalam keterangan persnya mengenai evaluasi perekonomian 2008 dan proyeksi 2009, di Jakarta, Jumat (19/12).

Hadir dalam kesempatan tersebut Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Benny Soetrisno, Ketua Umum Asosiasi Sepeda Motor Indonesia (AISI) Gunadi Sindhuwinata, Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Eddy Widjanarko, Ketua Gabungan Pengusaha Makanan Minuman Indonesia (Gapmmi) Franky Sibarani.

"Menkeu (Sri Mulyani) tidak ajak kami ketika keluaran kebijakannya. Lebih bagus Boediono dulu. Masih lumayanlah dengan paket-paket kebijakan yang dibuat. Kita diajak ngomong dulu. Tapi dengan Menkeu saat ini, kita rasanya dengar angin surga terus," keluh Ketua Umum Apindo Sofjan Wanandi.

Dengan gambaran demikian, menurut Sofjan, pengusaha meyakini kalau Indonesia baru akan keluar dari putaran krisis global setelah 3 sampai 4 tahun. Artinya, perekonomian Indonesia akan pulih kembali pada 2011.

Setali tiga uang, Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Benny Soetrisno melontarkan kritik yang sama kepada pemerintah SBY-JK. "Kita agak sedikit kecewa dengan pemerintah," ujarnya.

Ketika sepuluh instruksi Presiden dikeluarkan awal November, tuturnya, sikap pesimistis tersebut sudah dikemukakan olehnya. Terbukti dengan lambannya pemerintah memutuskan penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) dan suku bunga Bank Indonesia (BI). Padahal, negara-negara lain termasuk Amerika Serikat berani melakukan pemangkasan bunga hingga dari 0,75% menjadi 0,25%. Sementara Malaysia tujuh kali menurunkan harga BBM, secara bertahap.

"Kami minta suku bunga diturunkan. Di Indonesia ini kok sulit ya. Padahal di AS dan negara lain

tidak," timpal Eddy.

Pengusaha juga sepakat, sepanjang 2009 konflik dengan pekerja akan menjadi momok menakutkan bagi pengusaha, ketika keputusan PHK dilakukan. Selain tidak komunikatif, bermunculannya serikat-serikat pekerja baru juga tidak menyelesaikan masalah, akibat susahny titik temu antara kedua pihak. "Ada ketidakharmonisan," ucapnya.

Dari sisi ekspor, keseimbangan ekspor-impor tekstil nasional tahun ini bisa menurun US\$2 miliar untuk tekstil dan produk tekstil (TPT). Produk alas kaki diperkirakan akan mengalami penurunan ekspor hingga 25%. "Sampai Desember, industri sepatu mulai merumahkan 10 ribu orang. Tahun depan, angka itu makin melonjak menjadi 30 ribu orang," kata Eddy.

Sedangkan di sektor otomotif, Gunadi menerangkan dengan kondisi likuiditas ketat, suku bunga tinggi, serta pelemahan daya beli, permintaan mobil dan motor akan menurun 30% pada 2009. "Penjualan mobil tahun depan diprediksi hanya 400 ribu unit. Sedangkan penjualan motor 2009 hanya 4 juta unit," tuturnya.

Dari seluruh sektor yang ada, industri makanan-minuman (mamin) tidak banyak mengalami gangguan. Namun dari sisi daya beli, pengusaha mamin mengkhawatirkan adanya kebijakan pemerintah yang tidak memihak industri, termasuk inkonsistensi kebijakan. Misalnya Permendag Nomor 44 Tahun 2008 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu, yang akan berlaku 1 Januari 2009.

"Dari omset Rp350 triliun mamin tahun 2009, peredaran sekitar 15% produk impor ilegal mamin harus diwaspadai. Pemerintah harus konsisten laksanakan Permendag itu. Kita harus mampu kuasai pasar domestik kita sendiri," pungkas Ketua Gapmmi Franky Sibarani. (Media Indonesia)

C. SOSBUD

:

1. Indonesians, Australians exchange visa program

Young Indonesian university graduates could from next year be allowed to apply for a one-year Australian work and holiday visa, pending an agreement by both governments, an Australian Embassy official said Thursday.

Only applicants aged 18-30 would be eligible, and Australian youths would also be extended the same privileges in Indonesia.

Australian Embassy spokeswoman Jenny Dee said the reciprocal work and holiday visa would take effect as soon as the relevant administrative arrangements by each country had been finalized.

"The signing of a memorandum of understanding between the two countries has yet to be confirmed but is expected to take place in the near future," she said.

The new visa differs from a working holiday visa because it requires each applicant to obtain the support of the government, hold or be studying for a tertiary qualification, and have a good grasp of the language of the host country.

"This visa arrangement will allow young people from both countries to experience living in different countries," Australian Ambassador Bill Farmer told *The Jakarta Post* on Thursday.

Besides Indonesia, a number of other countries also have similar work and holiday visa arrangements with Australia, including the United States, Bangladesh, Chile, Turkey and Thailand.

Both governments have proposed an annual quota of 100 work and holiday visas that will be reviewed annually.

The visa initiative, first announced back in August, was on the agenda during the ninth ministerial meeting between the two countries in Canberra on Nov. 12.

Isi berita diluar tanggungjawab Direktorat Infomed, Deplu

There are around 16,000 Indonesians studying in Australia at present, and around 300,000 Australian tourists visit Indonesia each year.

Around 16,000 Australians currently live in Indonesia(The Jakarta Post)

D. HANKAM : Tidak Ada

E. HUKUM :

1. Pekerja Migran: Tinjau Ulang Perjanjian Bilateral

Menyambut peringatan Hari Migran Sedunia 18 Desember 2008, Institute for National and Democratic Studies (INDIES) meminta pemerintah meninjau ulang seluruh perjanjian bilateral di bidang perburuhan.

Syamsul Ardiansyah, Program Manager INDIES di Jakarta, Kamis (18/12), menyatakan, menurut penilaian INDIES, perjanjian- perjanjian bilateral di bidang perburuhan telah gagal memahami akar krisis yang melatari fenomena migrasi di Indonesia. Sebaliknya, justru turut memperburuk kehidupan dan mengabaikan perlindungan atas hak-hak dan kesejahteraan buruh migran Indonesia.

Pernyataan itu tertuang dalam analisis kebijakan berjudul "Memorandum of Misunderstanding, Policy Brief on Bilateral Labor Agreement of Indonesia" yang disusun tim peneliti INDIES.

Untuk memperjuangkan hak- haknya, para pekerja migran yang tergabung dalam berbagai organisasi, kemarin, beraksi di Bundaran Hotel Indonesia.

Tidak efektif

Menurut INDIES, ada beberapa hal penyebab ketidakefektifan perjanjian-perjanjian bilateral dalam memberikan perlindungan yang semestinya kepada buruh- buruh migran Indonesia yang kini berjumlah sekitar enam juta jiwa yang tersebar di berbagai kawasan dunia.

Pertama, perjanjian-perjanjian itu disusun sama sekali tanpa bersandar pada penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak asasi manusia, khususnya hak-hak buruh migran.

Hingga kini pemerintah tidak memiliki kerangka kebijakan perlindungan buruh migran yang tepat. Bahkan, Konvensi PBB tahun 1990 tentang Perlindungan Seluruh Hak Buruh Migran dan Keluarganya sebagai kerangka normatif perlindungan buruh migran sedunia belum juga diratifikasi Pemerintah Indonesia.

Kedua, perjanjian-perjanjian bilateral di bidang perburuhan yang ditandatangani pemerintah pada umumnya hanya memberikan perhatian pada pekerja di sektor formal. Padahal, mayoritas buruh migran Indonesia adalah pekerja di sektor informal.

Ketiga, selain tidak menekankan perlindungan hak terhadap buruh migran, beberapa perjanjian bilateral Indonesia di bidang perburuhan justru memberikan kekebalan hukum bagi pihak-pihak dari negara penerima yang melakukan pelanggaran hak terhadap buruh migran.

Keempat, perjanjian-perjanjian bilateral itu tidak disusun berdasarkan skala prioritas.

Kelima, perjanjian-perjanjian bilateral itu ditandatangani pada saat Pemerintah Indonesia sendiri gagal merumuskan kerangka kebijakan perlindungan yang komprehensif.

Bahkan, kebijakan seperti pemberlakuan terminal khusus kepulangan buruh migran, yaitu Gedung Pencatatan Kepulangan Tenaga Kerja Indonesia atau "terminal IV", justru menunjukkan Pemerintah Indonesia masih cenderung mendiskriminasikan, bahkan memperpanjang rantai pelanggaran hak terhadap buruh migran.

Keenam, pemerintah gagal merancang suatu proses negosiasi yang transparan dan partisipatif. Suara-suara buruh migran cenderung tak diakomodasi. Bahkan, pemerintah tak memberi kesempatan bagi buruh migran Indonesia untuk mengakses dan mendapat informasi komprehensif mengenai materi-materi pokok perjanjian-perjanjian bilateral di bidang perburuhan. (Kompas)

1.

- F. **OLAH RAGA** : **Tidak Ada**
- G. **LINGKUNGAN HIDUP** : **Tidak Ada**

III. ARTIKEL :

1. Viewpoint: Ali Alatas: 1932 to 2008 (By Ed Masters)

Indonesia has lost a world-renowned statesman, the United States has lost a good friend, and USINDO has lost a staunch supporter and dear colleague. Ali Alatas passed away last Friday in Singapore following a heart attack at the age of 76.

Allene and I first met Alex (as we called him) and Jun in the fall of 1964. He was serving as press spokesman and then Director of Information and Culture in the Foreign Ministry at a difficult time when Indonesia's relations with many nations, including the United States, were strained. But even then his guiding principle was clear. He was committed to working for greater international understanding and a reduction in world tensions and economic disparities.

Alex and Jun were tremendously popular among all elements of the disparate diplomatic community in Jakarta in the 1960s. They entertained frequently and graciously, often mixing up guest lists to include diplomats with quite different views -- and sometimes diplomats who were not supposed to recognize each other's existence. I remember a boating party at which we found ourselves trapped on a small boat with a Cuban couple.

It was impossible not to talk and we found common interests. When I returned to Washington in 1968 as State Department Director for Indonesian Affairs, Alex was already there as Ambassador Koko Sudjatmoko's political counselor and once again he strongly supported moves to strengthen the bilateral relationship.

Alex carried this ability to build bridges and bring diverse views together onto the wide international stage as Indonesia's representative to the UN agencies in Geneva, Permanent Representative to the United Nations in New York, and Foreign Minister for twelve years (1987-1999).

Many foreign leaders supported him for the position of UN Secretary General but the "stone in the shoe," as he put it, of East Timor made that final achievement impossible. This was regrettable, for he had worked long and hard but unsuccessfully within the Indonesian government for autonomy for East Timor and a better life for the people.

He played important roles in bringing peace to Cambodia in 1991, to the southern Philippines in 1996 and to easing tensions in Burma. In "retirement" he served as a UN Special Envoy, a member of the ASEAN Eminent Persons Group charged with charting new directions for the organization, and Chairman of President Yudhoyono's Presidential Advisory Council.

Some years ago I asked him if he would join former Secretary of State George Shultz as Honorary Chairman of the USINDO Board of Advisors. He readily agreed, for he had long felt that, while he did not always agree with U.S. policies, the two nations played important world roles and needed better understanding.

He shared his views on a number of occasions with the USINDO community and gave us invaluable guidance. He had to resign his USINDO position when he joined the President's Advisory Council but was always available to us. We shall greatly miss his wise counsel, steady good humor and most of all his friendship. Going to Jakarta will never be the same. (The Jakarta Post)

2. Perlucutan Nuklir Korut Masih Temui Kendala (Oleh Askan Krisna)

Kegagalan putaran terakhir perundingan enam negara mengenai pelaksanaan perlucutan nuklir Korea Utara, yang disepakati tahun lalu, membuat prihatin banyak pihak, termasuk Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

Sekretaris Jenderal (Sesjen) PBB, Ban Ki-moon, pada Jumat (12/12) menyerukan perundingan tersebut dilanjutkan agar pelaksanaan perjanjian yang diimbali dengan bantuan bahan bakar minyak satu juta ton atau energi yang setara serta konsesi-konsesi diplomatik kepada Korut itu, segera menjadi kenyataan meskipun upaya-upaya yang dilakukan dalam perundingan di Beijing, China, pekan ini mengalami kebuntuan lagi.

Dalam putaran terakhir perundingan enam pihak di Beijing yang berakhir Kamis, utusan Pyongyang menolak usul kompromi untuk mengabsahkan penutupan program nuklirnya.

Ban menegaskan, pihaknya sangat mendorong tujuan pengabsahan perlucutan nuklir di Semenanjung Korea, yang perundingannya melibatkan enam negara yakni China, AS, Russia, Jepang, Korsel dan Korut, sejak 2003 itu dilakukan secara damai.

Saat ini, perundingan nuklir Korea Utara masih menyisakan dua tahapan, setelah kesepakatan penutupan dan penghentian fasilitas nuklir Korea Utara dicapai tahun lalu, dan sebagian dilaksanakan dalam tahun ini.

Jepang menyatakan penyesalan atas kegagalan perundingan perlucutan senjata nuklir Korut itu, dan mengusahakan agar perundingan-perundingan maraton segera dilakukan.

"Kegagalan itu sangat disesalkan, saya ingin agar China berusaha merancang perundingan lanjutan itu lagi. Akan lebih bagus jika perundingan lanjutan itu dilakukan secepat mungkin, " kata Menteri Luar Negeri Hirofumi Nakasone setelah perundingan enam negara itu berakhir tanpa menghasilkan kesepakatan: mengenai bagaimana menetapkan apakah Pyongyang mengungkapkan dengan benar mengenai program-program atomnya.

Kegagalan putaran Beijing, diduga juga mengecilkan harapan pemerintah Presiden Amerika Serikat, George W. Bush, untuk memajukan perlucutan senjata nuklir Korut sebelum Presiden AS terpilih Barack Obama melangkah ke Gedung Putih.

Berdasarkan perjanjian 2007 yang melibatkan enam negara, Korut yang pernah melakukan ujicoba bom atomnya pada tahun sebelumnya, sepakat untuk menghentikan program nuklirnya dengan imbalan bantuan dan jaminan keamanan.

Namun, Jepang mengatakan, pihaknya tidak akan memberikan bantuan kepada Pyongyang sampai Korut mempertanggungjawabkan seluruh warga negara Jepang yang diculik oleh agen intelijen rezim negara komunis itu pada tahun 1970-an dan 1980-an, untuk dijadikan pelatih mata-mata.

Korea Utara pernah memulangkan lima orang di antara belasan warga Jepang yang diculik itu, dan mengatakan bahwa yang lainnya telah meninggal. Namun Tokyo bersikeras agar sejumlah warganya yang lain itu dipulangkan dan berpendapat bahwa mereka masih hidup.

Kebuntuan perundingan membuat para utusan gagal membuat kemajuan yang dapat memberikan satu penghargaan pada akhir masa pemerintah Presiden Bush.

Kekecewaan itu juga terlihat pada Ketua perunding AS, Asisten Menlu Christopher Hill, yang mengatakan tidak ada tanda-tanda bahwa persetujuan itu bisa dicapai, saat meninggalkan Beijing.

Menurut dia, kemacetan itu disebabkan oleh ketidaksediaan Korut untuk membuat komitmen-komitmen verifikasi secara tertulis, mengenai delarasi seluruh program nuklirnya yang disampaikan awal tahun ini.

Para pengamat berpendapat, perjanjian mengenai verifikasi akan membuka jalan untuk benar-benar melumpuhkan kemampuan senjata nuklir Korut itu. Dan ini dianggap sebagai kemenangan diplomatik bagi Presiden AS George W. Bush, sebelum dia menyerahkan jabatannya kepada Barack Obama, 20 Januari.

Bush selama ini mengecam Korut sebagai bagian dari "poros kejahatan" bersama Iran dan Irak, dan menempatkan mereka dalam `daftar hitam` negara penyokong terorisme.

Utusan Korsel, Kim Sook, mengatakan bahwa Korut menolak usul-usul untuk mengizinkan para pemeriksa

Isi berita diluar tanggungjawab Direktorat Infomed, Deplu

nuklir PBB mengambil contoh-contoh nuklir untuk menguji deklarasi nuklirnya.

Berkaitan dengan itu, jurubicara Deplu AS, Sean McCormack, menegaskan bahwa pihaknya tidak mengesampingkan untuk menempatkan kembali Korut dalam daftar hitam negara-negara yang dituduh mensponsori terorisme.

Korut dilaporkan telah menutup sebagian fasilitas nuklirnya di Yongbyon tahun ini. Tapi sejauh itu mereka menolak menyepakati protokol untuk pengecekan deklarasi aktivitas nuklir Utara, dan perkembangannya.

Dalam kaitan ini, China sebagai tuanrumah penyelenggara perundingan telah menawarkan rancangan teks, yang menguraikan cara-cara untuk memverifikasi deklarasi nuklir tersebut. Namun rancangan tersebut ditolak.

Padahal, Kim Sook menegaskan, bahwa semua pihak yang terlibat dalam perundingan enam negara telah sepakat untuk mengapalkan semua bantuan ekonomi yang dijanjikan kepada Pyongyang pada akhir Maret depan.

Kegagalan perundingan Beijing dalam putaran terakhir, dikhawatirkan banyak pihak akan memperpanjang kemelut pertikaian nuklir di semenanjung, dan bisa menyebarkan kecemasan di kalangan masyarakat internasional.

Pada Oktober lalu, AS mengatakan, setelah dicapainya persetujuan mengenai prosedur verifikasi, AS akan mencabut Korea Utara dari daftar hitam terorisme. Tetapi berdasarkan beberapa alasan, Pyongyang justru berencana akan memulai kembali pabrik-pabrik nuklir penghasil plutonium yang sebelumnya dilaporkan telah ditutup.

Ketua delegasi Jepang, Akitaka Saiki, mengakui memang ada jurang beda-pendapat yang dalam antara Korut dan ke lima negara, mengenai cara-cara verifikasi.

Karena itu, harapan agar perundingan perlucutan senjata nuklir Korut segera diselesaikan, tampaknya masih akan menemui kendala, dan ini akan menjadi `pekerjaan rumah` bagi Presiden AS terpilih mendatang. (ANTARA)

3. Kesetiakawanan di Tengah Krisis Global (oleh Bambang W Soeharto)

Setelah mengampanyekan jargon "There is No Day Without Solidarity" (2007), tahun ini peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional bertema "Bersama dan Peduli".

Tema itu dimaksudkan untuk membangkitkan nilai-nilai solidaritas dalam kehidupan berbangsa-bernegara. Sebab, kebersamaan sebagai jati diri bangsa amat diperlukan guna menghadapi tiap tantangan kebangsaan.

Perwujudan kesejahteraan rakyat di tengah krisis global saat ini, merupakan tantangan yang harus dihadapi bersama. Dalam situasi yang tidak menguntungkan itu, tak ada pekerjaan yang lebih mulia selain menggerakkan program-program pembangunan yang dijiwai semangat kesetiakawanan sosial nasional.

Terkikis zaman

Gagasan kesetiakawanan berawal dari solidaritas kerakyatan dan kebangsaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Solidaritas muncul karena kesamaan nasib (sejarah), kesamaan wilayah (teritorial), kesamaan kultural, dan bahasa. Menurut Ernest Renan [1823-1892], semua itu merupakan modal untuk membentuk nation. Kesadaran kebangsaan memuncak seiring deklarasi Sumpah Pemuda 1928. Sebuah semangat mengubah "keakuan" menjadi "kekamian" menuju "kekitaan".

Selanjutnya, kesetiakawanan sosial nasional tumbuh kuat karena faktor penjajahan. Dalam hal ini, kesetiakawanan mengejawantah dalam perjuangan mengusir penjajahan, baik masa prakemerdekaan maupun pascakemerdekaan. HKSN sendiri bermula dari semangat solidaritas nasional antara TNI dan rakyat dalam mengusir Belanda yang kembali pada 19 Desember 1948. Akhirnya kebersamaan yang dilandasi semangat rela berkorban dan mengutamakan kepentingan bangsa menjadi senjata ampuh untuk memerdekakan bangsa.

Namun, fakta lain menunjukkan, nilai-nilai kesetiakawanan kian terkikis. Saat ini solidaritas itu hanya muncul di ruang politik dengan semangat membela kepentingan masing-masing golongan. Menguat pula

Isi berita diluar tanggungjawab Direktorat Infomed, Deplu

solidaritas kedaerahan yang mewujud dalam komunalisme dan tribalisme. Di bidang ekonomi, nilai solidaritas belum menjadi kesadaran nasional, baik di level struktural, institusional, maupun personal.

Menguatnya kesenjangan di berbagai ruang publik merupakan indikator melemahnya kesetiakawanan sosial. Basis-basis perekonomian dikuasai segelintir orang yang memiliki berbagai akses. Juga terjadi kesenjangan antarwilayah, antara pusat dan daerah, antarpulau, antaretnik, dan antargolongan.

Menurut Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah (2006), ada tiga hal yang menggerus nilai kesetiakawanan sosial. Pertama, menguatnya semangat individualis karena globalisasi. Gelombang globalisasi dengan paradigma kebebasan, langsung atau tidak, berdampak pada lunturnya nilai-nilai kultural masyarakat.

Kedua, menguatnya identitas komunal dan kedaerahan. Akibatnya, semangat kedaerahan dan komunal lebih dominan daripada nasionalisme.

Ketiga, lemahnya otoritas kepemimpinan. Hal ini terkait keteladanan para kepemimpinan yang kian memudar. Terkikisnya nilai kesetiakawanan menimbulkan ketidakpercayaan sosial, baik antara masyarakat dan pemerintah maupun antara masyarakat dan masyarakat, karena terpecah dalam aneka golongan.

Menemukan kembali

Dalam perjalanan sejarah, kita memerlukan momentum untuk membangkitkan semangat dan daya implementasi baru. Di tengah krisis finansial global, mungkin sudah saatnya menemukan kembali nilai-nilai kesetiakawanan sosial guna menjawab aneka masalah kebangsaan.

Saatnya kita menumbuhkan apa yang disebut Komaruddin Hidayat (2008) *grand solidarity* untuk kemudian diaplikasi ke dalam *grand reality*. *Grand solidarity* adalah rasa kebersamaan untuk membangun bangsa, yang didasarkan atas spirit, tekad, dan visi yang diajarkan *founding father's*. Adapun *grand reality* adalah upaya untuk mengaplikasi masa lalu ke konteks masa kini. Pada level praksis, program-program pembangunan harus dilandasi semangat kesetiakawanan yang diwujudkan dalam bentuk pemberdayaan. Pemerintah wajib memberi umpan (akses permodalan), memandu bagaimana cara memancing (akses SDM), menunjukkan di mana memancingnya (akses teknologi dan informasi), serta menunjukkan di mana menjual ikannya (akses market).

Di tingkat masyarakat, dapat ditradisikan satu orang kaya yang tinggal di permukiman miskin membantu satu orang miskin. Inilah yang disebut kepedulian sosial. Jika hal ini dilakukan secara simultan, akan tercipta keharmonisan di tingkat negara maupun kehidupan masyarakat.

Maka, inilah saatnya kita menemukan kembali solidaritas sosial nasional dan jati diri bangsa. Kita harus menumbuhkan semangat kebersamaan dan kepedulian dalam menghadapi tantangan kebangsaan. Seperti apa yang selalu dikatakan Bung Karno *samen bundeling van alle krachten van de natie*.(Kompas)

IV. LAIN-LAIN : T i d a k
Ada
V. EDITORIAL :

1. Perdamaian Butuh Keadilan

Meski berkali-kali diingkari, dilanggar, dan tidak ditaati, usaha untuk mewujudkan perdamaian di Timur Tengah tidak pernah kenal kata putus asa.

Itulah yang tecermin dari diterbitkannya Resolusi 1850 oleh Dewan Keamanan (DK) PBB, Selasa lalu. Resolusi, yang drafnya didukung AS dan Rusia itu, didukung oleh 14 anggota DK, dan satu anggota—satunya negara Timur Tengah, yakni Libya—abstain. Inilah resolusi pertama dalam lima tahun terakhir.

Terbitnya resolusi itu mengirimkan isyarat penting bahwa konflik Israel-Palestina harus diakhiri, dan dimahkotai perdamaian di antara kedua negara. Tidak bisa dimungkiri memang bahwa sudah demikian banyak resolusi yang diterbitkan oleh Majelis Umum PBB dan juga DK PBB, tetapi selalu tidak memberikan hasil. Demikian pula perundingan terakhir, Annapolis 2007.

Pengingkaran, pelanggaran, dan pengkhianatan sekian banyak naskah perjanjian damai juga tidak menjadi penghambat bagi masyarakat internasional untuk mendorong terciptanya perdamaian di wilayah yang menjadi pusaran konflik itu. Konflik di kawasan Timur Tengah pula yang telah menyebarkan virus ketidakdamaian di berbagai belahan dunia.

Semua pihak yang mendukung resolusi tersebut bersepakat bahwa resolusi yang mendorong kedua belah pihak untuk kembali ke meja perundingan adalah sangat penting. Akan tetapi, sekali lagi, semuanya terpulang kepada kedua belah pihak yang berkonflik.

Resolusi bukanlah sebuah jaminan absolut bagi terciptanya perdamaian. Apa yang akan terjadi setelah penerbitan resolusi sepenuhnya bergantung pada kemampuan Israel dan Palestina menghormati kewajiban mereka, khususnya di bidang keamanan.

Sebenarnya, kalau Resolusi 242 pada tahun 1967 ditaati, persoalan sudah selesai. Resolusi itu mengharuskan Israel mundur dari seluruh wilayah yang direbut dalam Perang 1967. Resolusi itu juga menganjurkan agar yang berkonflik saling menghormati eksistensi mereka.

Seruan Resolusi 242 itu juga pernah disampaikan lagi oleh Arab Saudi dalam prakarsa perdamaianya pada tahun 2002. Bahkan, dalam prakarsa Arab Saudi disebutkan bahwa semua anggota Liga Arab akan mengakui Israel kalau Israel mundur dari wilayah pendudukan dan membiarkan negara Palestina berdiri.

Baik rakyat Israel maupun Palestina pasti mengharapkan bahwa perdamaian yang merupakan anugerah bagi mereka yang telah lelah karena penderitaan dan muak terhadap peperangan akan segera terwujud. Akan tetapi, kita semua menyadari bahwa perdamaian sejati hanya akan terwujud apabila di sana ada keadilan.(Kompas)

Jakarta, 19 Desember 2008
Sub Direktorat Berita
Direktorat Informasi dan Media
Deplu